



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online  
(ePaper)*

SUBJEK

EKONOMI

Selasa, 31 Desember 2024

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN  
Perpustakaan  
2024**

## **Daftar Isi**

1. Bappenas: RPJMN 2025-2029 Tonggal Awal Menuju Indonesia Emas 2045 – *Media Online Kompas*
2. Tantangan Ekonomi Maritim 2025 – *Media Online Kompas*
3. Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8% – *Media Online Media Indonesia*
4. RPJMN 2025-2029 Dorong Peningkatan Kontribusi Daerah – *Media Online Media Indonesia*
5. Kenaikan Upah dan PPN Mengerek Inflasi di 2025 – *Media Online Kontan*
6. Next Five Years Outlined in The RPJMN – *Media Online The Jakarta Post*
7. Growth Target: The Myth Of The Middle-income Trap – *Media Online The Jakarta Post*
8. Pertimbangkan Tantangan Ekonomi Saat Ini – *Media Online Investor Daily*

## Bappenas: RPJMN 2025–2029 Tonggak Awal Menuju Indonesia Emas 2045

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan perencanaan pembangunan nasional lima tahun ke depan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Musrenbangnas RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).



Presiden Prabowo Subianto



Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy



FOTO: DOK. SETWAPRES/KEVIN AKBAR

Presiden Prabowo tegaskan pentingnya RPJMN sebagai tonggak awal perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam agenda yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tersebut, Prabowo mengartikan pentingnya RPJMN sebagai tonggak awal perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. "Negara kita menelaah perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan nasional yang ditetapkan dalam pendidikan UUD 1945. RPJMN menjadi fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujarnya.

RPJMN 2025-2029 menjadi fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045 dengan mengedepankan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN menjadi pijakan strategis untuk

mencapai target pembangunan nasional. RPJMN disusun sejalan dengan pemikiran ahli ekonomi nasional Profesor Widjyo Nitisastro bahwa perencanaan pembangunan harus berdasarkan pada asas perencanaan, Pancasila, dan UUD 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. RPJMN merupakan ejawantah dari Asta Cita yang menjadi visi dan misi Presiden. Asta Cita diturunkan ke dalam 8 prioritas nasional yang didukung 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik setiap.

**Sasaran Utama Pembangunan Nasional**  
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan penurunan kemiskinan merupakan penekanan pertama dalam RPJMN 2025-2029. Indonesia menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5

persen pada 2029 dan menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026.

Dia menegaskan, upaya ini melibatkan perlindungan sosial terintegrasi, pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan. "Proyek strategis nasional harus mendukung pencapaian tujuan ini dengan dampak langsung bagi masyarakat luas," jelas Rachmat.

RPJMN 2025-2029 juga menargetkan

pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029. Adapun untuk mencapai hal ini, pemerintah menetapkan strategi antara lain peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, hilirisasi industri, penerapan ekonomi hijau dan biru, serta menjadikan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang *pro-growth*. RPJMN memuat berbagai indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) lima tahun ke depan.

"Salah satu PSN yang berdampak luas adalah program makan bergizi. Sesuai arahan Presiden, program ini tidak hanya untuk memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, tetapi juga mendorong prestasi dan partisipasi siswa. PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN," ujarnya.

Program makan bergizi gratis ini akan mendorong pemertanian baru terhadap hasil pertanian pangan, lapangan kerja, sarana dan prasarana logistik. Pemertanian itu bisa memulihkan desa swasembada pangan, energi, dan air yang beresni dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

"Dengan dana desa dan program makan bergizi yang berfokus di desa akan meningkat hingga lima atau enam kali lipat. Program ini juga akan menciptakan permintaan baru untuk hasil pertanian lokal, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan menciptakan perekonomian desa," ujar Prabowo.

Program makan bergizi gratis ini juga sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan target Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59 pada 2029. Strategi ini mencakup pembangunan sekolah unggul baru, peningkatan layanan kesehatan terintegrasi, dan perbaikan kesejahteraan guru.

"Melalui pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang memadai, kita membangun generasi emas yang akan memimpin bangsa ini di masa depan," ujarnya.

**Ekosistem pembangunan daerah diperkuat**

Rachmat juga menegaskan, program nasional hasil Musrenbangnas diharapkan harus bisa dijenjalkan oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah supaya selaras, terpadu, dan terwujud dalam suatu perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spatial sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.

"Keunggulan daerah terhadap transfer ke daerah sangat besar. Untuk itu, strategi penguatan keuangan daerah perlu didorong, melalui peningkatan potensi pendapatan daerah, perluasan pendanaan alternatif, dan mendorong belanja produktif," ujarnya.

Strategi penguatan tersebut harus dikawal di tingkat nasional dan daerah. Oleh sebab itu, RPJMN ini telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tiap provinsi, yang menjadi acuan kepala daerah untuk dikawal pencapaiannya. Transformasi digital akan menjadi penggerak pembangunan. Transformasi digital dapat meningkatkan pemerataan negara dan mengurangi kebocoran.

**Urgensi pemerintahan bersih**

Prabowo menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih dalam mendukung implementasi RPJMN. Untuk itu, budaya-budaya korupsi dan budaya mencuri rayak harus dihilangkan. Dengan adanya teknologi seperti *e-catalogue* dan *e-government* dapat menjadi solusi atas hal tersebut.

"Budaya *markas*, pergelambungan proyek, dan kebocoran anggaran harus kita hilangkan. Ini adalah komitmen kita untuk membangun pemerintahan yang bersih," ujarnya. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah guna memantapkan program prioritas pelaksanaan dengan baik.

Keberhasilan RPJMN 2025-2029 tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi juga menitikberatkan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak swasta, sebagai fondasi penting dalam pelaksanaan program-program prioritas. Musrenbangnas menjadi ruang partisipatif memberikan kesempatan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan visi dan strategi pembangunan.

"Kita harus melindungi rakyat kita. Melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti komprehensif, dalam arti yang menyeluruh. Melindungi secara fisik artinya rakyat kita harus cukup makan. Melindungi secara fisik rakyat kita, rakyat kita harus cukup makan. Melindungi segenap tumpah darah artinya kita harus waspada pangan," ujarnya.

Dengan RPJMN 2025-2029 sebagai panduan, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Melalui kolaborasi lintas sektor, dukungan dari seluruh elemen bangsa, serta komitmen untuk perubahan, tujuan ini dapat tercapai. "Mari, kita wujudkan Indonesia yang maju, beradab, dan sejahtera," pungkask Prabowo.



FOTO: FOTO: DOK. HUMAS BAPPENAS/MACHFUDD

Presiden RI dan Wakil Presiden RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan jajaran usai pelaksanaan Agenda Musrenbangnas dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029.

# KOMPAS

SELASA

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

31 DESEMBER 2024

## Tantangan Ekonomi Maritim 2025

Risiko suplai dan permintaan angkutan maritim global, termasuk Indonesia, akan terpengaruh oleh ketidakpastian ekonomi dan bayang-bayang perang dagang antarnegara adidaya.

Yosepha Debrina Rath

**T**erpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat meningkatkan kekhawatiran terhadap ketidakpastian ekonomi pada tahun 2025. Salah satunya perang dagang antara AS dan China yang sempat memanas pada kala Trump memimpin AS pada 2017-2021. Kecemasan ini diperkirakan bakal berlanjut tahun depan.

Ketidakpastian ekonomi ditambah bayang-bayang perang dagang antarnegara adidaya ini juga akan berimbas pada Indonesia. Risiko suplai dan permintaan angkutan maritim global, termasuk Indonesia, akan terpengaruh.

"Ekonomi maritim global, termasuk nasional, akan dipengaruhi adanya gangguan, termasuk risiko permintaan jasa maritim, terutama akibat risiko tensi geopolitik, menurunnya ekonomi (resesi) global," ujar pengajar maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Raja Oloan Saat Gurning, Senin (30/12/2024).

Selain itu, kebijakan proteksionisme akan diterapkan oleh negara-negara besar, seperti AS, China, Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Imbasnya, penyesuaian yang membatasi interaksi ekonomi dan perdagangan melalui laut.

Masalah dari sisi suplai, Saat melanjutkan, terjadi persoalan turunan lain, seperti gangguan atau disrupsi suplai maritim. Hal ini erat kaitannya dengan perang di Timur Tengah, Eropa, dan potensi di Asia. Suplai berlebih ruang muat kapal di berbagai pelabuhan utama dunia menimbulkan masalah baru.

"Termasuk masih belum terutilisasinya Terusan Suez dalam perdagangan Asia-Eropa dan sebaliknya sehingga rute tetap masih panjang dan lama serta relatif mahal. Kondisi ini



Pekerja beristirahat siang di dermaga peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (25/4/2024). Keterlibatan lebih besar perusahaan nasional Indonesia dalam sektor logistik sangat dinanti untuk menghadapi tantangan ekonomi maritim 2025.

mendorong faktor tambahan baru lewat diversifikasi suplai, partner bisnis, dan proses bisnis baru," tutur Saat.

Permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun. Hal ini seiring makin revidahnya pemanfaatan kapasitas jasa pelayaran, pelabuhan, operator logistik maritim (*forwarder*), dan galangan kapal.

China sebagai salah satu barometer ekonomi Asia juga mendapat tekanan domestik. Imbasnya, perdagangan internasional Indonesia ke China akan terpengaruh.

Sejumlah faktor akan menyusutkan permintaan impor-tasi, termasuk eksportasi dari

dan ke Indonesia. Mereka adalah pertumbuhan ekonomi China yang menurun, tingginya biaya tenaga kerja, turunnya tingkat konsumsi di China, serta menyusutnya animo perdagangan luar negeri.

Pendiri sekaligus Direktur The National Maritime Institute Siswanto Rusdi berpendapat, perang dagang jilid II akan menekan pelayaran peti kemas yang biasa mengangkut beragam komoditas. Sebab, peti kemas telah memiliki kontrak angkut. Kebijakan baru diwajibkan akan mengubah, bahkan membatalkan kontrak. Namun, bisnis kapal

tanker dinilai akan sedikit mendapatkan angin segar karena AS tidak membatasi kebutuhan energinya.

"Bayangkan ketika sudah diterapkan pajak progresif oleh Trump, biaya rute yang ditutup atau *bank sailing*. Penutupan rute terjadi karena permintaan turun, bahkan kosong sama sekali," katanya.

Selain itu, para ekspor-tir akan dirugikan dari fenomena ini. Biaya jasa naik, tetapi kapal yang tersedia belum tentu ada. Pada saat bersamaan, pemilik barang akan menunggu tanpa kepastian. Secara agregat, biaya logistik suatu negara

akan terkerok naik. Risiko yang diperkirakan bakal terjadi pada 2025 ini erat kaitannya dengan logistik transportasi yang belum menjadi arus utama dalam kebijakan.

### Peluang Indonesia

Di balik kelaburnya proyeksi industri logistik dan maritim tahun depan, optimisme masih dicoba dibangun. Peluang yang ada perlu dimanfaatkan optimal guna memperbesar pangsa pasar dari dampak isu geopolitik dan perang dagang.

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILEA) Yukki Nugrahawan Hanafi

mengatakan, perang dagang mendorong penetrasi investasi asing ke Indonesia. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia.

"Perusahaan-perusahaan ini dapat mendirikan pabrik di Indonesia dan tetap mengeksport produk ke AS tanpa menghadapi tarif tinggi yang berlaku jika mereka mengeksport langsung dari China," ujarnya.

Yukki mengatakan bahwa pemerintah tetap perlu menjamin perusahaan-perusahaan lokal, termasuk penyedia jasa logistik, turut menerima manfaat dari peningkatan investasi asing. Keterlibatan lebih besar perusahaan nasional Indonesia

dalam sektor logistik dinanti.

### Efek domino PPN

Gejolak geopolitik global jelas akan berimbas pada dinamika logistik dan maritim Indonesia. Namun, kebijakan dalam negeri juga akan menambah beban tantangan pada tahun mendatang. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 ditambah daya beli masyarakat yang masih lemah bakal memengaruhi dinamika tersebut.

Saat menilai, kebijakan-kebijakan itu bakal menurunkan permintaan angkutan laut serta level trafik dan kargo pelayaran. PPN 12 persen akan berpengaruh bagi proses manufaktur, produksi, dan konsumsi, termasuk penambahan biaya operasi kapal perusahaan pelayaran, pelabuhan, serta operator logistik nasional.

Dampak dominonya, PPN 12 persen akan menggerus profit penyedia jasa, termasuk pengusung akhir. Permintaan secara makro juga bisa berkurang akibat meningkatnya indeks risiko usaha. Akibatnya, volume perdagangan jadi berkurang, termasuk pendapatan para pemilik atau penerima barang (*shipper/consignee*).

"Tentu membuat daya saing komoditas nasional menurun dibandingkan dengan negara Asia atau ASEAN dengan tingkat PPN lebih rendah. Dampaknya, komoditas nasional sulit masuk ke pasar internasional. Makin sulitnya penetrasi kargo nasional akibat PPN ini berpotensi mengurangi potensi trafik maritim," ujar Saat.

Senada, Siswanto berpendapat kenaikan PPN sangat berpengaruh pada bisnis pelayaran. Dalam rantai industri ini, justru usaha logistik yang akan hidup, antara lain perusahaan *forwarder*, ketimbang jasa transportasi atau alat angkut, seperti kapal, bus, dan truk.

Selasa, 31 Desember 2024

## Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Pemerintah telah menyiapkan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8% berkelanjutan.

YAKUB PRYATAMA WIJAYATMAJA  
yakub.p@mediaindonesia.com

**M**ENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah menyiapkan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8% berkelanjutan. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Delapan strategi tersebut ialah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (*foreign direct investment*) berorientasi ekspor dan investasi tanpa anggaran pendapatan belanja negara (AFBN).

Strategi selanjutnya ialah belanja negara untuk produktivitas melalui program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, *electric vehicle*, dan lain-lain.

"Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang *pro-growth*," ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, RPJMN me-



← < 2/17 > →

ANTARA FOTODIRAGAN AL SARESI

**PENINGKATAN PRODUKTIVITAS:** Buruh tani menyiapkan bibit padi yang akan ditanam di kawasan persawahan di Cibiru Hilir, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/12). Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan menjadi salah satu strategi untuk mendorong ekonomi tumbuh 8% berkelanjutan.

rupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam proyek strategis nasional (PSN) lima tahun ke depan. PSN sendiri adalah proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.

Menurut dia, salah satu PSN yang memberikan dampak luas program MBG yang akan memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, serta mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

"PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanjaan negara Rp71 triliun, bisa meningkatkan 0,86%," ungkap Rachmat.

Program MBG akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, lapangan kerja, hingga sarana dan prasarana logistik yang bakal menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, serta air. Hal itu diiringi si-

nergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

"Jika Presiden Prabowo pada waktu itu punya program *big push strategy*, ini adalah contoh *big push strategy* yang langsung bisa dilaksanakan karena agregat *demand* yang besar diminta akan menimbulkan *supply* juga yang besar. Jadi, *demand creates supply* ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga

bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," kata Rachmat. Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3%, kemudian pada 2026 sebesar 6,3%, lalu 7,3% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan 8% pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0%.

### Optimistis

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto optimistis bisa bikin keagungan pihak luar negeri soal rencana

capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Target tersebut sesuai dengan visi Prabowo. "Saya optimistis. Saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin keagungan semua pihak, pihak-pihak luar negeri," ujar Prabowo.

Prabowo mengemukakan dirinya ditantang pihak dari luar negeri terkait dengan pertumbuhan ekonomi 8% itu. Prabowo membeberkan, jika targetnya tercapai, ia akan diratifikasi malam gratis.

"Saya malah ditantang. Ada pihak-pihak dari luar negeri

yang menantang saya, mereka yakin kita tidak mungkin 8%. Kalau mencapai 8%, saya akan dikasih makan malam gratis. Saya boleh pilih menu. Saya akan pilih menu yang paling mahal, tapi karena saya sudah agak (gemuk), saya harus mengurangi berat badan," ungkapnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menerangkan Indonesia butuh investasi senilai US\$900 miliar, atau setara Rp13,528 triliun, hingga 2029 jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% (Ant/H-2)



Selasa, 31 Desember 2024

## RPJMN 2025-2029 Dorong Peningkatan Kontribusi Daerah

RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mendorong perkembangan dan kemandirian ekonomi. Itu ditujukan agar tiap daerah di Indonesia dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Rachmat Pam-budy menuturkan, selama ini mayoritas daerah di Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ketergantungan itu, menurutnya, perlu untuk dikurangi.

"Untuk itu strategi penguatan keuangan daerah perlu didorong melalui peningkatan potensi pendapatan daerah, perluasan pendanaan alternatif, dan mendorong belanja lebih produktif. Strategi penguatan tersebut harus dikawal di tingkat nasional dan daerah," kata Rachmat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029, kemarin.

"Oleh sebab itu, RPJMN telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi yang menjadi acuan kepala daerah untuk dikawal pencapaiannya," lanjut Rachmat.

Dari paparannya, kontribusi daerah dibagi menjadi dua kawasan, yakni kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dalam RPJMN 2025-2029 daerah di kawasan Indonesia Barat diharapkan mampu mencapai angka pertumbuhan

"Dalam RPJMN 2025-2029 daerah di kawasan Indonesia Barat diharapkan mampu mencapai angka pertumbuhan ekonomi hingga 7,7%, sementara kawasan Indonesia Timur diharapkan mampu tumbuh 8,8%."

ekonomi hingga 7,7%, sementara kawasan Indonesia Timur diharapkan mampu tumbuh 8,8%.

Hal itu diperlukan agar target pertumbuhan ekonomi nasional 8% dapat terealisasi secara bertahap. Penguatan belanja pemerintah daerah disebut menjadi salah satu strategi penting yang dapat dilakukan pemerintah daerah.

Sementara itu, saat memberikan arahan dalam Musrenbangnas tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah pusat selama ini telah memberikan dukungan melalui TKD, salah satunya dalam bentuk dana desa.

Dia menilai dana desa yang selama ini diberikan boleh jadi tak mencukupi kebutuhan pembangunan daerah di lingkup terkecil. Namun, Kepala Negara meyakini nantinya daerah akan mendapatkan perputaran uang berkali-kali lipat dari program yang dijalankan pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis (MBG).

"Dana desa adalah sekarang Rp1 miliar satu tahun. Benar, ya? Dengan program makan bergizi, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik lima, enam, tujuh kali, (jadi) kita akan tambah, tetapi

melalui mekanisme yang kita yakin harus sampai ke sasaran," kata Prabowo.

Program makan bergizi gratis telah menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dari hitungan Bappenas, pelaksanaan program tersebut akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 0,86% di tahun pertama RPJMN 2025-2029.

Program tersebut juga dinyatakan bakal mendorong permintaan baru. Pada akhirnya, berdasarkan kalkulasi pemerintah, program makan bergizi gratis akan menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, dan air. Dus, itu sekaligus akan mendorong ekonomi lokal, atau pemerintahan daerah dari lingkup desa hingga provinsi.

Karena itu, Prabowo juga mengharapkan dukungan kepala daerah untuk ikut menyukseskan agenda besar dan program pemerintah pusat.

"Para gubernur, saudara-saudara pemimpin yang paling dekat dengan rakyat. Saudara-saudara yang paling dekat, para bupati yang paling dekat, yang paling tahu masalah. Insya Allah dengan kita mengelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik," kata dia. (Mir/J-3)

## Kenaikan Upah dan PPN Mengerek Inflasi di 2025

Tingkat inflasi di akhir 2024 masih terkendali, namun pada 2025 bisa menembus 2,5%

Dendi Siswanto,  
Siti Masitoh

JAKARTA. Tingkat inflasi di pengujung tahun 2024 diperkirakan berada di bawah target pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). Meski terdorong aktivitas dan mobilitas masyarakat di periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), inflasi pada Desember 2024 dianggap masih terkendali.

Sejumlah ekonom memproyeksikan, tingkat inflasi tahunan (*year-on-year/yoy*) pada akhir 2024 bergerak di rentang 1,50%-1,73%. Estimasi itu lebih tinggi dibanding inflasi November 2024 di level 1,55% *yoy* (lihat tabel).

Kepala Ekonom BCA David Sumual memprediksi tingkat inflasi pada Desember 2024 di level 1,60% *yoy*. Angka ini diperkirakan sesuai target Bank Indonesia (BI) yaitu pada kisaran 2,5% plus minus 1%. Sementara target inflasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 sebesar 2,8% *yoy*.

Dia menyebutkan, inflasi pada Desember masih tetap terkendali meski pada akhir tahun biasanya terjadi kenaikan yang didorong faktor musiman seperti peningkatan belanja masyarakat. "Belanja

akhir tahun sering kali mendorong kenaikan harga bahan pangan dan inflasi inti," tutur David, Minggu (29/12).

Secara bulanan, Bank Permata memperkirakan inflasi pada Desember 2024 akan meningkat menjadi 0,54% *month-on-month* (mom) dari 0,30% pada November 2024.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan kenaikan ini terutama dipicu peningkatan perminta-

**Pemerintah juga perlu memastikan kelancaran distribusi barang.**

an selama liburan Nataru. Adapun inflasi kelompok harga bergejolak diproyeksikan naik signifikan menjadi 2,54% mom dari 1,07% mom pada November 2024. "Terutama dipengaruhi kenaikan harga berbagai harga komoditas pangan, termasuk cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan telur ayam," ujar dia, kemarin. Seiring meningkatnya inflasi bulanan, Josua memprediksi tingkat inflasi tahun-

an berada di kisaran 1,67% *yoy* pada Desember 2024.

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang menilai, tren inflasi di paruh kedua 2024 cenderung rendah, disebabkan efek *high base* dari kenaikan harga bahan pangan sejak 2023 hingga awal 2024. "Sejalan momen libur Nataru, kami memperkirakan inflasi Indonesia sepanjang Desember 2024 berada di 0,33% mom dan 1,73% *yoy*," kata dia, kemarin.

*Chief Economist* Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo, juga menyebut kenaikan permintaan selama libur akhir tahun, termasuk Nataru, menjadi faktor utama pendorong inflasi pada bulan tersebut. Namun, inflasi kelompok *administered prices* diperkirakan mengalami def-

lasi. Hal ini sejalan penurunan tarif angkutan udara berlaku selama periode Nataru.

Pada tahun depan, sejumlah ekonom kompak memprediksi inflasi berpotensi menanjak dibandingkan 2024.

Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets dari Bank Maybank, Myrdal Gunarto meramal, inflasi Indonesia pada 2025 bisa menembus 2,53% *yoy*, jauh di atas estimasi inflasi di akhir 2024 di level 1,62% *yoy*.

Dia bilang, prediksi inflasi 2,53% dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk kenaikan tarif PPN menjadi 12%, peningkatan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5%, serta potensi gangguan iklim yang dapat memengaruhi pasokan pangan.

David Sumual juga mem-

prediksi inflasi berpotensi kembali meningkat menuju 2,5%. Namun dia melihat, faktor daya beli masyarakat yang lemah diperkirakan dapat menjadi penghambat kenaikan inflasi yang signifikan.

Untuk itu, David menyoroti pentingnya langkah pemerintah menjaga stabilitas inflasi. Ia menyarankan agar pemerintah memastikan kelancaran distribusi barang. "Serta identifikasi mana daerah-daerah yang surplus dan defisit untuk melakukan mitigasi dampak," kata dia.

### Tren Laju Inflasi Tahunan

Nov 2024	1,55%
Okt 2024	1,71%
Sept 2024	1,84%
Ags 2024	2,12%
Jul 2024	2,13%
Jun 2024	2,51%
Mei 2024	2,84%
Apr 2024	3,00%
Mar 2024	3,05%
Feb 2024	2,75%
Jan 2024	2,57%
Des 2023	2,61%
Nov 2023	2,86%

Sumber: Bank Indonesia

### Proyeksi Inflasi Desember 2024

Nama ekonom	Lembaga	Inflasi bulanan	Inflasi tahunan
Josua Pardede	Bank Permata	0,54%	1,67%
Hosianna E Situmorang	Bank Danamon	0,33%	1,73%
Myrdal Gunarto	Bank Maybank		1,62%
David Sumual	Bank BCA		1,60%
Banjaran S Indrastomo	Bank Syariah Indonesia		1,50%

Sumber: Wawancara KONTAN

## Next five years outlined in the RPJMN

The National Development Planning Agency (Bappenas) has formally announced the national priorities in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) at the National Development Planning Conference (Musrenbangnas) held in Jakarta on Monday. The event was attended by President Prabowo Subianto, Vice President Gibran Rakabuming Raka, ministers of the Red and White Cabinet, along with leaders of high-level state institutions, heads of government agencies, governors, regional heads, regional secretaries and heads of regional development planning boards (Bappeda).

In his opening speech, Rachmat said the Musrenbangnas was a participatory and inclusive forum to formulate the direction of the national medium-term development plan policy, which followed a public consultation forum that has been held since early December.

He cited the late economist Widjojo Nitisastro, who said that planning revolved around determining the goals to be achieved within a certain time, as well as the most efficient and rational way to achieve said goals.

"Professor Widjojo Nitisastro also based development planning on Pancasila and the 1945 Constitution to achieve a just and prosperous society. In our opinion, the national strategic project (PSN) must support these goals. If it is not in line with that, then it is not suitable to be implemented as a national strategic project," he said.

According to Rachmat, as an elaboration of the President's Asia-Centric vision and mission, the 2025-2029 RPJMN emphasizes halving the poverty rate to 4.5-5 percent in 2029 and eliminating extreme poverty by 2026. In addition, the plan aims to increase the Human Capital Index to 0.59 percent in 2029 from 0.53 percent in 2024, and economic growth toward 4.8 percent.

"Reducing the poverty rate is carried out through integrated social protection, community empowerment and improving infrastructure and education and health services. The strategy for improving the quality of human resources is focused on providing healthy nutritious food, eradicating tuberculosis, building new superior schools, integrated health services and improving the quality and welfare of teachers," he explained.

**Outlining the strategy**  
In pursuing sustainable economic growth of 8 percent, the 2025-2029 RPJMN emphasizes eight strategies, namely increasing agricultural productivity toward food self-sufficiency, industrialization and down streaming, implementing a green economy and a blue economy, strengthening tourism and creative economy, centering cities as economic growth centers, digital transformation, export-oriented foreign direct investment (FDI), and non-state budget (APBN) investment, and productivity-focused state spending. Meanwhile, the policy steps taken will include deregulation of licensing and permits alongside growth-oriented fiscal and monetary policies as supported by the Finance Ministry.

As an indicator of performance and development focus, the 2025-2029 RPJMN includes 17 priority programs and eight "best result" programs, one of



Courtesy of National Development Planning Agency

which is the free nutritious meals program.

"This program not only fulfills the needs of pregnant women, toddlers and children but also encourages student achievement and participation. This national strategic program (PSN) will improve the welfare of the wider community, create jobs and increase economic growth by 0.86 percent in the first year of the RPJMN," Rachmat said, adding that the program would see state spending of Rp 71 trillion.

At the same time, the free nutritious meals program will encourage new demand for agricultural products, food and jobs, logistical facilities and infrastructure while also establishing villages that are self-sufficient in food, energy and water which synergize with forest development and food, energy and water reserves.

The PSN, he continued, would create aggregate demand, which in turn would create supply that would serve as a driving force for regional and national economic growth.

The national program resulting from the Musrenbangnas is expected to be translated by ministries and institutions as well as regional governments so that it is harmonious, integrated and structured in a thematic, holistic, integrative and spatial planning manner according to the characteristics of each region. This will require support from a regional development ecosystem, including certainty of spatial planning, fulfillment of minimum national development planning standards and increasing the quality of human resources accompanied by strengthening the foundation of regional finances.

Rachmat acknowledged that there was considerable regional dependence on transfers to regions (TRD). For that reason, he said, a strategy to strengthen regional finances needed to be encouraged through increasing regional income potential, seek alternative funding and encouraging more productive spending.

This funding strategy must be monitored at the national and regional levels. Therefore, the RPJMN has set economic growth targets for each province which are used as a reference by regional heads to monitor their achievements. Digital

**“**  
The founders of this country adhered to the understanding that the economy is structured on the basis of the principle of family. The government is not just a regulator, the government is responsible, elected by the people, the protector of the people.  
**”**

President Prabowo Subianto



Courtesy of National Development Planning Agency

transformation will also drive development and growth, as it can improve fiscal efficiency and reduce monetary leakage. In very large amounts.

The 2025-2029 RPJMN contains priority indicators that must be included in the strategic plans of ministries and institutions, principal interventions for each province and indicators that support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). The achievement of these indicators will be monitored periodically through the national

development risk management mechanism by the Bappenas.

Rachmat also noted that precision planning always required accurate statistical data from Statistics Indonesia (BPS) as well as spatial data from the Geospatial Information Agency (BIG) within the framework of Satu Data Indonesia. In accordance with President Prabowo Subianto's direction, the single catalogue of socioeconomic data currently included by BPS will become the basis for future national development.

people, as the protector of the people. The government must be a leader, a pioneer, a manager. The government must manage the economy, the government must maintain all the wealth of the Indonesian nation."

Referring to this idea as the Pancasila economy, Prabowo explained the philosophy as a fusion between the best of the two, precariously balancing and combining the best of the understanding of the free market, capitalism, as well as the best of the planned economy that Indonesia had adhered to since its independence. He added that the RPJMN was a valuable strategic step that had to be maintained in the future.

"The fact is that the first president made an eight-year development plan, then the second president continued with a five-year development plan. We are standing in the Bappenas building, which reminds us that our economy must be held fast. Our economy is the Pancasila economy, an economy based on family values. That we still steadfast, still holding on to the notion that development must be planned," he said.

With the RPJMN President Prabowo emphasized that without a plan, Indonesia would not know the direction it should take. While he conceded that the nation may not achieve 100 percent of the goals set forth, knowing what to achieve was the first step.

Furthermore, he revealed that the priority that was mentioned in the 1945 Constitution was the need to protect the Indonesian people. From even before he was sworn in as President, he continued, his goal had always been to protect all Indonesians and the underlying values of the country.

For Prabowo, one key way to guarantee the country's wellness and protection was through ensuring the health of its people, particularly through the free nutritious meals program under the PSN.

"To protect our people, physically our people must have enough to eat. Protecting all our blood means we must be alert about food. How can we protect the entire nation if we cannot guarantee food? There is no country, no civilization without food," he said. "How can we play a role if our house is not in order, if our kitchen is not in order?"

Therefore, it is important for me to convey this because our efforts to sufficiency on food and on energy are the basis of sovereignty."

Another factor that took center stage in the president's speech was the need for a clean government. Referring to the RPJMN, human resource development is within the eight priorities of the national plan, Prabowo mentioned that, in the past, many had expressed doubts about the country's reputation in the future.

"The government that I lead has no doubts. We adhere to the 1945 Constitution; we adhere to the ideals of the founders of the Indonesian nation. We have good intentions; we want to lead this nation with a clean government."

He added that the country needed better morale to ensure that it would be able to graduate from negative elements, such as legal logging and mining, deforestation and online gambling. He ended his speech by emphasizing that the nation needed to remember the 1945 values to further the journey in realizing Golden Indonesia 2045.

"Our country needs mature planning to achieve the national goals set out in the preamble to the 1945 Constitution, concluded President Prabowo.



Courtesy of Vice Presidential Secretariat (Setpres)



Courtesy of Vice Presidential Secretariat (Setpres)

## Growth target: The myth of the middle-income trap

The idea of the middle-income trap has long haunted countries striving to reach high-income status. Indonesia, having recently attained upper middle-income status, is often cast as the latest protagonist in this narrative.

But this concept, while catchy, is deeply flawed. The so-called trap is neither a definitive barrier nor unique to middle-income countries. It's a policy challenge: an opportunity to innovate policies, adapt and unlock new growth engines.

Under the leadership of President Prabowo Subianto, who took office in October, Indonesia has set an ambitious target: Driving economic growth to at least 8 percent annually within the next five years. This leap from the current 5 percent range could eradicate poverty and shatter the middle-income ceiling.

But the key question remains: How can Indonesia not only spark, but also sustain, such rapid growth?

To transform ambition into reality, Indonesia must focus on both strategy and execution. Three critical directions can chart its course: outward orientation, domestic integration and growth through inclusion.



By **Norimasa Shimomura** and **Philip Schellekens**

Jakarta/Bangkok

*Norimasa Shimomura is UNDP Indonesia resident representative. Philip Schellekens is UNDP chief economist for Asia and the Pacific. The views expressed are personal.*

Indonesia's outward orientation is vital for accessing global markets, acquiring advanced technologies and fostering innovation. Doubling down on exports is a proven accelerator; just ask South Korea or Vietnam. Staying competitive in this arena will require nimble trade policies and investments in high-value sectors.

Domestic integration is warranted, as regional disparities remain a drag on Indonesia's economy. Bridging the gaps between urban and rural areas can unlock untapped potential, ensuring that all regions contribute to and benefit from growth. Strengthening logistics and regional connectivity will be key to achieving this.

Growth through inclusion starts from the premise that greater inclusion in and of itself can be an enabler of sustained growth. Indonesia could realize the gender dividend by promoting female labor force participation. It could also generate a growth impulse by

having the informal sector contribute more to national growth. An industrial policy for the informal sector is long overdue.

Strategies alone do not drive development. Execution is the real challenge. Success requires the embrace of three core principles: future orientation, strategic focus and a relentless commitment to implementation.

Climate change shifts in demographics and technology and changing patterns in globalization make the development landscape of the future more challenging. Indonesia must stay agile against this changing backdrop, anticipating disruptions and adjusting strategies to remain resilient. Future orientation is therefore key.

Technocratic laundry lists of policy solutions are outdated and dilute impact. Success will lie in prioritizing a few transformative initiatives in the form of strategic big bets. This helps align resource-

es and efforts more sharply with national goals and increases the likelihood of success.

Consistent and continuous implementation is critical. Most attention should be devoted to this department, which requires strengthening institutional capacity for executing and monitoring policies, as well as independent reviews to assess the progress being made.

It's time to retire the myth of the middle-income trap. The real challenge lies in adaptability, focus and follow-through.

Asia offers no shortage of inspiration. Singapore, under Lee Kuan Yew, and China, guided by Deng Xiaoping, achieved remarkable growth through bold visions paired with pragmatic strategies. Indonesia can emulate these successes by adapting them to its unique context and aspirations.

Critics may call Indonesia's vision of zero poverty and 8 percent growth unrealistic. But history is built by bold leaps, not timid steps. As Stewart Brand once said, "This present moment used to be the unimaginable future."

With clear priorities, strategic discipline and unwavering commitment, Indonesia is poised to defy the odds and rewrite its development story.

# INVESTOR DAILY

INDONESIA

SELASA, 31 DESEMBER 2024

## Pertimbangkan Tantangan Ekonomi Saat Ini

**JAKARTA, ID** – Keinginan pemerintah untuk tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terkesan memprioritaskan kepatuhan pada aturan yang dibuat di masa lalu, tanpa mempertimbangkan dinamika dan tantangan ekonomi saat ini. Situasi ekonomi yang terus berkembang menuntut fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dan tidak kontraproduktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Oleh Nasori

Pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) Muhammad Anwar menjelaskan, dalih bahwa kebijakan tersebut adalah amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) secara hukum dapat dibenarkan, tetapi kebijakan pajak tidak semata-mata soal legalitas. Kebijakan fiskal juga harus mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. "Kerasnya keinginan untuk menaikkan PPN justru menimbulkan pertanyaan, tentang kemampuan pemerintah untuk mengeksplorasi potensi perpajakan lain yang lebih adil dan progresif, seperti pajak atas kekayaan, pajak karbon, atau optimalisasi penerimaan dari sektor informal dan digital yang masih belum tergarap maksimal," jelas dia kepada *Investor Daily*, pekan lalu.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk mengoreksi kebijakan tersebut, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Langkah ini tidak hanya legal secara konstitusional, tetapi juga mencerminkan empati pemerintah terhadap keresahan publik.

Waktu yang tersisa beberapa hari depan adalah peluang penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat. Menunda kenaikan PPN melalui Perppu bukan hanya keputusan pragmatis, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan kebijakan fiskal tidak menjadi bumerang yang memperburuk daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Anwar menjelaskan, jika kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% dibatalkan, pemerintah perlu mengantisipasi beberapa dampak fiskal yang signifikan. Dampak yang perlu diantisipasi adalah pertama, potensi penurunan penerimaan pajak.

Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, PPN memiliki peran penting dalam menopang APBN. Pembatalan kebijakan ini dapat mengurangi pendapatan yang telah dianggarkan untuk berbagai program pembangunan dan belanja negara, sehingga memaksa pemerintah untuk menyesuaikan proyeksi pendapatannya. "Kedua, pembatalan kenaikan

PPN menjadi 12% akan memperbesar defisit anggaran, terutama jika belanja pemerintah tetap berjalan sesuai rencana tanpa adanya penyesuaian. Akibatnya, pemerintah mungkin perlu mengurangi belanja pada sektor-sektor nonprioritas atau menunda proyek infrastruktur besar untuk menjaga keseimbangan fiskal," jelas dia.

Dalam kondisi ini, menurut Anwar, pemerintah harus mencari cara alternatif untuk menutupi kekurangan pendanaan. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengoptimalkan belanja negara, dengan memprioritaskan anggaran untuk program yang paling mendesak dan produktif. "Ketiga, pemerintah mungkin harus mengalokasikan utang untuk menutupi defisit anggaran. Meskipun utang dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga kelangsungan program-program pembangunan, peningkatan ketergantungan pada utang perlu diantisipasi dengan hati-hati," kata dia.

Kenaikan utang berpotensi meningkatkan beban pembayaran bunga utang di masa depan, yang pada gilirannya akan mengurangi ruang fiskal untuk pembiayaan sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, beban bunga utang yang semakin tinggi dapat membatasi fleksibilitas fiskal pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara.

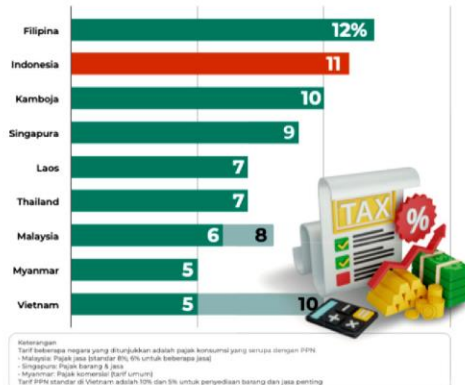
Namun, meskipun dampak fiskal tersebut penting untuk diperhitungkan, penurunan tersebut tidak sebanding dengan dampak regresifitas PPN terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah.

Sebelumnya, Direktur Hukum Center of Economics and Law Studies (Celios) Mhd Zakiul Fikri berpendapat kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 berpotensi mencekik daya beli masyarakat. Pemerintah dapat membatalkan kenaikan PPN melalui Perppu karena situasi mendesak dan norma hukum terkait tidak memada. "Langkah ini diperlukan untuk mencegah dampak buruk bagi ekonomi dan Masyarakat," jelas dia, Kamis (26/12/2024).

Zakiul mengatakan, ada tiga alasan mengapa Perppu pembatalan kenaikan PPN 12% harus dikelu-

### Tarif PPN Indonesia Terbesar Kedua di Asean

Data tarif PPN Indonesia dan negara Asean lainnya tahun 2024. PPN Indonesia berada di posisi kedua di wilayah Asean.



SUMBER: PWC, KPMG

arkan. Pertama, norma kenaikan PPN menimbulkan masalah hukum yang mendesak untuk diselesaikan. Masalah hukum itu mulai dari inflasi atau naiknya harga barang jasa, merosotnya kemampuan konsumsi rumah tangga kelas menengah ke bawah, meningkatnya angka pengangguran, terkejutnya UMKM, industri manufaktur dan potensi menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. Kedua, keberadaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Bab IV Pasal 4 Angka 2 UU HPP 2021 tidak memadai karena tidak memuat kepatutan dan keadilan hukum.

Ketiga, kondisi saat ini tidak mungkin diatasi dengan cara membuat atau merevisi undang-undang melalui prosedur biasa, mengingat memakan waktu yang cukup lama sementara keadaan telah mendesak. "Keadaan mendesak, sebab per 1 Januari 2025 perintah norma yang problematik dari Pasal 7 ayat (1) Bab IV Pasal 4 Angka 2 UU HPP 2021 harus dilaksanakan. Sementara, DPR RI sedang berada pada masa reses dari 6 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025, sehingga tidak mungkin persoalan tersebut dibicarakan bersama dalam waktu dekat," kata Zakiul.

Menurut dia, hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009, maka

tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menerbitkan Perppu yang membatalkan berlakunya ketentuan kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Menerbitkan Perppu yang dimaksud merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan Jokowi pernah menerbitkan Perppu No.1 Tahun 2017 tentang Kepentingan Pajak. Perppu ini lahir terkait tax amnesty yang lebih banyak dinikmati oleh orang kaya dan pengemplang pajak. "Kalau Jokowi menerbitkan Perppu untuk orang kaya dan pengemplang pajak, maka ini saatnya Prabowo meninggalkan bayang-bayang Jokowi, dengan menerbitkan Perppu membatalkan kenaikan PPN 12% di UU HPP dan saatnya berpihak pada masyarakat menengah bawah yang tengah dihimpit berbagai kesulitan ekonomi," ungkap Zakiul.

#### Sumber Pendapatan Baru

Sementara itu, Anwar berpendapat, pemerintah masih memiliki peluang untuk meningkatkan

penerimaan negara dengan mencari sumber pendapatan baru yang lebih adil dan progresif, yang dapat mengurangi ketergantungan pada pajak konsumsi seperti PPN yang cenderung regresif.

Beberapa sumber pendapatan yang dapat digali adalah pertama, pajak atas kekayaan. Pajak ini dapat dikenakan pada individu atau entitas yang memiliki kekayaan di atas ambang batas tertentu, seperti properti, saham, dan aset lainnya. Pengenaan pajak kekayaan ini dapat membantu redistribusi kekayaan dengan cara yang lebih adil, karena kelompok masyarakat yang lebih mampu akan menyumbangkan kontribusi yang lebih besar tanpa membebani kelompok berpendapatan rendah.

"Kedua, pajak karbon juga merupakan sumber penerimaan yang sangat relevan, mengingat urgensi perubahan iklim dan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pajak karbon dapat dikenakan pada perusahaan atau sektor yang menghasilkan emisi karbon dioksida, dengan tujuan untuk mendorong industri beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan," kata dia.

Selain memberikan penerimaan tambahan, pajak karbon juga dapat menjadi insentif untuk mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan. "Ketiga, pemerintah juga perlu memperhatikan sektor informal dan digital yang selama ini belum tergarap secara optimal," jelas dia.

Sektor informal, menurut Anwar, meskipun sering kali sulit untuk dipajak, mencakup sejumlah besar pelaku usaha yang dapat dikenakan pajak dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terukur.

Digitalisasi ekonomi, di sisi lain, membuka peluang besar untuk meningkatkan penerimaan pajak. Banyak perusahaan digital besar yang beroperasi di Indonesia namun belum sepenuhnya terdaftar atau membayar pajak sesuai dengan keuntungan yang mereka hasilkan. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa sektor digital juga berkontribusi pada penerimaan negara.

Dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang lebih progresif ini, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. (th)